



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.1/ 16 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 September 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,



SRI ENDAH YUNIASTUTI
NIP. 19680604 199503 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.1/ 16 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/ PEMRAKARSA	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NAS-KAH AKA-DE-MIK	PENJE-LASAN/ KETE-RANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	1. Penyesuaian terkait dengan Besaran Tarif Pajak Air Tanah. 2. Penambahan Tarif Retribusi.		Ubah	2026		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Maret 2026	1. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pergub. Jateng Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN	Pengaturan tentang pembentukan karakter, kepribadian, dan budi pekerti luhur dengan meningkatkan keterampilan dan kemandirian.	Baru		2026	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Agustus 2026	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
3.	PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Ruang Lingkup 3. Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Pengembang Perumahan 5. Sarana Prasarana dan Utilitas 6. Peran Serta Masyarakat 7. Larangan 8. Pengawasan dan Pembinaan 9. Sanksi	Baru		2026	NA		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Maret 2026	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	PENGARUSUTA MAAN GENDER	Pengaturan tentang pengintegrasian perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di daerah	Baru		2026	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Agustus 2026	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5.	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG	1. Substansi Materi yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi tidak sesuai		Ubah	2026		Penjelasan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Maret 2026	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PENGGILINGAN PADI	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Peizinan Penggilingan padi dilakukan melalui <i>Online Single Submission</i>.</p>								Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
6.	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERJA SAMA DAERAH	Substansi Materi yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak relevan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.	Ubah	2026		Penjelasan	Bagian Pemerintahan Setda	Maret 2026	Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	Pengembangan, Penggabungan dan Pemisahan Perangkat Daerah		Ubah	2026		Penjelasan	1. Bagian Organisasi Setda 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Badan Keuangan Daerah	Maret 2026	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8.	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR	1. Nama dan Tempat Kedudukan 2. Kegiatan Usaha 3. Modal 4. Organ dan Kepegawaian 5. Pembinaan dan Pengawasan	Baru		2026	NA		Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Maret 2026	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Sektor Keuangan. 2. Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (PERSERODA) beserta perubahannya;
9.	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR	1. Organ dan kepegawaian 2. Perencanaan 3. Operasional dan Pelaporan 4. Penggunaan Modal	Baru		2026	NA		Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Maret 2026	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Evaluasi 6. Pembinaan dan Pengawasan Penugasan dari Pemerintah								2. Mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar beserta seluruh perubahannya
10.	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BANK KARANGANYAR	1. Nama dan Tempat Kedudukan 2. Kegiatan Usaha 3. Modal 4. Organ dan Kepegawaian 5. Pembinaan dan Pengawasan	Baru		2026	NA		Bagian Perekonominan dan SDA Setda	Maret 2026	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

DAFTAR PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/PEMRA-KARSA	TARGET PENYAM-PAIAN
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan/Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan c. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Baru		2026		Penjelasan	Badan Daerah Keuangan	Desember 2026
			Baru		2026		Penjelasan	Badan Daerah Keuangan	Oktober 2026
			Baru		2026		Penjelasan	Badan Daerah Keuangan	Juli 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindakanjuti putusan Mahkamah Agung.							

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,



SRI ENDAH YUNIASTUTI
NIP. 19680604 199503 2 003